**PENGARUH TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI KOTA BANDAR LAMPUNG**

****

**Disusun oleh :**

**Nama : Wulan Wahyuningtyas**

**NPM : 2416041111**

**Kelas : Reguler D**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025/2026**

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pendahuluan**

Untuk memberikan dasar konseptual dan dasar akademik untuk penelitian, Bab II ini mencakup ringkasan literatur. Studi sebelumnya tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik di tingkat nasional maupun internasional, dibahas dalam bab ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menentukan posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dan menemukan cara untuk mengisi gap penelitian, atau gap penelitian. Bab ini membahas teori dan konsep yang digunakan untuk melakukan analisis, selain penelitian sebelumnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang transparansi dan akuntabilitas, serta hubungannya dengan peraturan resmi yang mengatur pengelolaan dana BOS, faktor pendukung dan penghambat juga dibahas. Ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan yang memengaruhi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di institusi pendidikan.

Adanya dasar teori ini memungkinkan penelitian dilakukan dengan lebih jelas dan sesuai dengan kerangka ilmiah. Pada bagian akhir, kerangka berpikir disusun secara naratif untuk menjelaskan hubungan logis antara variabel yang diteliti. Transparansi dipandang sebagai faktor yang mendorong terciptanya akuntabilitas, dengan dukungan dari sumber daya manusia, teknologi, partisipasi masyarakat, dan budaya organisasi sekolah. Kerangka berpikir ini menjadi pedoman dalam menganalisis data dan menegaskan kontribusi penelitian dalam memperkaya literatur mengenai tata kelola dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung.

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Selama lima tahun terakhir, penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik berkembang, terutama dana BOS. Penelitian di mana tingkat nasional dan internasional telah dilakukan menunjukkan bahwa kedua ide berdampak signifikan pada manajemen pendidikan. Transparansi menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat dan mengawasi penggunaan dana pendidikan sedangkan akuntabilitas menjamin bahwa pihak yang mengelola dana tersebut harus membawa semua keputusan dan tindakan mereka. Untuk alasan itu, evaluasi penelitian sebelumnya sangat penting untuk pemahaman tempat penelitian ini dan ide gap labournya.

**2.1.1 Penelitian Internasional**

Secara internasional, studi menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas telah diterima sebagai prinsip dalam pendidikan. Sebagai contoh, menurut Atukunda , transparansi dan akuntabilitas adalah pilar penting dari good governance dalam manajemen sekolah. Studinya menunjukkan bahwa transparansi dari pihak-pihak yang berkepentingan, adopsi dari kerangka hukum, dan teknologi digital memungkinkan dalam pemanfaatan prinsip-prinsip tersebut. Studi ini terkait dengan fenomena penelitian kami karena tanpa transparansi, akuntabilitas tidak akan terjadi dan sebaliknya.

Penelitian lain oleh Nielsen dkk. (2021) juga menegaskan bahwa partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas terikat satu sama lain dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Meskipun penelitian ini lebih luas mengenai sektor publik, temuannya bisa tepat diterapkan dalam sektor pendidikan. Prinsip-prinsip terkait keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat yang dibicarakan dalam studi tersebut juga relevan dalam manajemen dana BOS di sekolah. Selain itu, ini membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukanlah isu lokal, tetapi merupakan bagian dari agenda global governance.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rusyunizal, Abdul Karim, dan kolega (2025) menemukan bahwa sekolah yang melibatkan masyarakat dalam evaluasi dan secara teratur melaporkan penggunaan dana publik memiliki kepercayaan publik yang lebih besar. Studi ini membantu kita memahami bahwa akuntabilitas tidak hanya terkait dengan kepatuhan administratif; itu juga mencakup tanggung jawab moral kepada masyarakat. Terbukti bahwa transparansi pelaporan meningkatkan kredibilitas institusi pendidikan di mata publik. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan betapa pentingnya untuk menggabungkan keterbukaan informasi dengan tanggung jawab yang jelas.

Selama pandemi COVID-19, Fatima, Haliah, dan Nirwana (2022) melakukan penelitian dan menemukan bahwa sekolah yang menggunakan sistem keuangan digital lebih mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan dapat dilakukan secara cepat dan akurat meskipun tidak ada interaksi tatap muka karena teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan teknologi sangat penting untuk mendukung sistem pendidikan kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini relevan karena menekankan pentingnya digitalisasi dalam manajemen dana BOS.

**2.1.2 Penelitian Nasional**

Studi tentang transparansi dan akuntabilitas dana BOS juga cukup banyak dilakukan di Indonesia. Zahra (2024) melakukan penelitian di SMP Negeri 4 Pelaihari dan menemukan bahwa ada akuntabilitas yang baik untuk pengelolaan dana BOS, tetapi masih ada sedikit transparansi publik. Sekitar 71% terbuka, yang menunjukkan kemajuan tetapi masih belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di sekolah menengah pertama masih menjadi masalah besar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dinata (2023) di SMAN 12 Pekanbaru, prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dengan baik. Sekolah menyusun RKAS melalui pertemuan dengan guru dan perwakilan orang tua, dan laporan keuangan dipublikasikan melalui sistem informasi sekolah. Keterlibatan orang tua dalam proses perencanaan membuat keputusan keuangan sekolah lebih diakui. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi publik memiliki kemampuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Seperti yang ditunjukkan oleh Ryanti (2023) di SD Negeri 01 Sawahan Kota Padang, keterlibatan komite sekolah dan penempatan laporan pertanggungjawaban di papan pengumuman merupakan bentuk transparansi yang sebenarnya. Selain itu, pengawasan dinas pendidikan meningkatkan tanggung jawab sekolah. Temuan ini relevan karena menunjukkan praktik transparansi dan tanggung jawab di sekolah dasar, yang dapat dibandingkan dengan SMP Negeri. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran awal tentang bagaimana menerapkan tata kelola BOS di tingkat dasar.

Untuk menyelidiki pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, Sudyartini dan Wafa (2022) di Yogyakarta menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara transparansi dan akuntabilitas dengan efektivitas pengelolaan dana BOS. Namun, metode kuantitatif ini hanya menekankan hubungan antarvariabel tanpa mempelajari proses implementasi secara menyeluruh. Akibatnya, untuk memahami dinamika yang lebih kompleks, penelitian kualitatif masih diperlukan.

Kajian Jurnal P4I (2022) tentang pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Bandar Lampung adalah penelitian lokal yang sangat relevan. Penelitian ini melihat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana BOS dengan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa, meskipun sekolah telah mengikuti prosedur formal, masih ada masalah seperti keterlambatan pencairan dana serta keterbatasan bendahara sekolah untuk mendapatkan pelatihan teknologi. Penelitian ini penting karena mengambil konteks yang sama dengan penelitian saat ini; namun, penelitian ini belum secara khusus menyelidiki hubungan antara transparansi dan akuntabilitas.

**2.1.3 Sintesis dan Research Gap**

Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang perlu diperhatikan berdasarkan analisis penelitian sebelumnya. Persamaannya, penelitian nasional maupun internasional setuju bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah komponen penting dari tata kelola pendidikan. Transparansi memungkinkan orang tahu tentang apa yang terjadi dengan dana, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan dana bertanggung jawab. Kedua prinsip ini bekerja sama dengan baik satu sama lain dan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Studi internasional lebih menekankan peran teknologi digital dan partisipasi publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, studi nasional lebih menekankan penerapan regulasi, partisipasi komite sekolah, dan sistem pelaporan administratif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konteks lokal mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas sekolah.

Kajian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa masih ada banyak kesenjangan dalam penelitian. Pertama, ada sedikit penelitian yang dilakukan tentang transparansi dan akuntabilitas dana BOS di SMP Negeri di kota besar seperti Bandar Lampung. Kedua, sedikit penelitian kualitatif tentang dinamika implementasi telah dilakukan karena sebagian besar penelitian nasional menggunakan pendekatan kuantitatif. Ketiga, variabel pendukung seperti partisipasi publik, infrastruktur teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia belum banyak diteliti sebagai variabel penting. Keempat, penelitian lokal saat ini lebih banyak menekankan prosedur administrasi daripada hubungan konseptual antara transparansi dan akuntabilitas.

Akibatnya, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah ini dengan menyelidiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha mengatasi masalah ini. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik nyata di lapangan, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan tata kelola dana BOS. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan konteks lokal, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih luas tentang penerapan prinsip Good Governance dalam pendidikan.

**2.2 Landasan Teori**

Untuk memastikan bahwa variabel yang diteliti memiliki dasar akademis yang kuat, dasar teori memberikan dasar konseptual untuk penelitian ini. Teori Good Governance dari UNDP (1997) digunakan dalam penelitian ini, yang menekankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas. Dengan teori ini, transparansi dan akuntabilitas dilihat sebagai konsep administratif tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas tata kelola sekolah. Selain teori, peraturan pemerintah, seperti Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, berfungsi sebagai acuan penting.

**2.2.1 Teori Good Governance sebagai Applied Theory**

Teori Good Governance muncul dari kebutuhan untuk membuat tata kelola pemerintahan lebih jelas, adil, efektif, dan terlibat. Menurut UNDP (1997), Good Governance terdiri dari prinsip-prinsip berikut: partisipasi, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kesetaraan, efektifitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Filosofi ini dianggap universal dan dapat diterapkan pada banyak bidang, seperti manajemen pendidikan. Dalam konteks sekolah, Good Governance berarti bahwa setiap pemangku kepentingan, mulai dari kepala sekolah, guru, komite, orang tua, hingga pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dana BOS dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam manajemen yang baik, prinsip transparansi mengacu pada fakta bahwa informasi harus diberikan kepada masyarakat umum. Transparansi bukan hanya berarti memberikan informasi dalam bentuk yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Sekolah harus membuat akses publik mudah terhadap data penggunaan dana BOS melalui papan pengumuman, rapat komite, atau sistem digital seperti e-BOS. Jadi, transparansi tidak hanya sekadar formalitas; itu adalah alat yang efektif untuk mengontrol sosial.

Meskipun demikian, akuntabilitas mengacu pada fakta bahwa pengelola dana bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang diambil. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS berarti setiap uang yang dikeluarkan harus sesuai dengan RKAS yang dibuat sebelumnya dan mengikuti aturan yang berlaku. Selain itu, akuntabilitas melibatkan kewajiban moral sekolah untuk melaporkan kepada masyarakat dan memastikan bahwa dana digunakan secara tepat untuk kepentingan siswa. Akibatnya, akuntabilitas dalam Good Governance tidak hanya administratif tetapi juga substansial.

Teori Good Governance digunakan dalam penelitian ini karena praktis. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS sekolah telah memenuhi standar tata kelola yang baik, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat digunakan sebagai indikator operasional. Selain itu, teori ini diakui secara global dan telah menjadi acuan dalam banyak kebijakan pemerintah, termasuk di Indonesia. Jadi, teori Good Governance memberikan legitimasi akademis dan praktis untuk penelitian ini.

**2.2.2 Konsep Transparansi**

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah berarti berbagi informasi dengan semua yang berkepentingan. Rencana penggunaan dana (RKAS), jumlah dana yang diterima, dan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran adalah semua informasi yang dibuka. Menurut Rusyunizal dkk. (2025), transparansi dicapai melalui laporan keuangan terbuka, komunikasi rutin, dan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dana publik. Oleh karena itu, jelas bahwa sekolah bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang cukup.

Untuk mengukur transparansi, ada beberapa indikator. Pertama, keterbukaan jumlah dana BOS yang diterima sekolah setiap tahunnya; kedua, publikasi RKAS yang menunjukkan rencana penggunaan dana secara rinci; dan ketiga, penyampaian laporan realisasi anggaran kepada pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. Keempat, penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi e-BOS, untuk mempermudah akses publik ke informasi. Kelima, masyarakat dapat memberikan pendapat mereka tentang penggunaan dana melalui forum diskusi seperti rapat komite sekolah.

Transparansi penting karena informasi harus tersedia dan masyarakat dapat memahaminya. Informasi yang terlalu teknis atau terlalu sulit dipahami dapat membuat transparansi kurang efektif. Akibatnya, sekolah harus memberikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami, lengkap, dan relevan. Ini sejalan dengan prinsip Good Governance, yang menekankan bahwa transparansi harus mendukung akuntabilitas, bukan hanya memenuhi kewajiban formal.

Dalam kenyataannya, transparansi sering menghadapi banyak masalah. Salah satunya adalah kurangnya kemampuan karyawan sekolah untuk membuat laporan keuangan yang akurat dan informasi. Ada juga masalah lain, yaitu masyarakat kurang menggunakan informasi yang diberikan. Selain itu, beberapa sekolah memiliki sumber daya teknologi yang terbatas. Akibatnya, transparansi harus ditingkatkan melalui pelatihan karyawan, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi.

**2.2.3 Konsep Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS berarti bahwa sekolah harus bertanggung jawab atas semua penggunaan dana sesuai dengan peraturan. Menurut Mahmudi (2019), akuntabilitas publik terdiri dari tiga komponen: akuntabilitas hukum, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas moral. Dalam konteks sekolah, ini berarti pengelolaan dana harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan, mengikuti prosedur administratif yang telah ditetapkan, dan memiliki moralitas untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan siswa.

Ada beberapa aspek penting yang membentuk akuntabilitas. Pertama, rencana yang tertuang dalam RKAS sesuai dengan penggunaan dana. Kedua, sekolah mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku, seperti Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Ketiga, laporan pertanggungjawaban rutin disampaikan kepada pemerintah, komite sekolah, dan masyarakat. Terakhir, komite sekolah terlibat secara aktif dalam melacak penggunaan dana sebagai perwakilan masyarakat. Kelima, audit eksternal atau pengawasan pihak berwenang untuk mencegah penyalahgunaan dana.

Akuntabilitas juga mencakup aspek penting, yaitu seberapa efektif penggunaan dana BOS untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Misalnya, apakah dana digunakan untuk membeli buku, memperbaiki sarana prasarana, atau membiayai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan siswa, maka akuntabilitas substantif belum terpenuhi jika dana digunakan untuk hal-hal yang tidak relevan. Hal ini terjadi meskipun laporan keuangan administratif dibuat dengan baik. Oleh karena itu, akuntabilitas harus dianggap sebagai tanggung jawab yang mencakup semua tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab administratif.

Akuntabilitas menghadapi banyak masalah seperti transparansi. Kendala utama adalah kekurangan pengawasan masyarakat, yang memungkinkan penyalahgunaan dana tidak terdeteksi. Selain itu, bendahara sekolah tidak memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Selain itu, ada beberapa sekolah di mana kepala sekolah tidak menyadari pentingnya pertanggungjawaban yang terbuka. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM merupakan komponen penting dalam meningkatkan akuntabilitas.

**2.2.4 Regulasi dan Kebijakan Dana BOS**

Berbagai regulasi di Indonesia mengatur dana BOS, yang terus diperbarui sesuai kebutuhan. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS baru-baru ini menetapkan bahwa setiap sekolah harus menyusun RKAS, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, menyampaikan laporan pertanggungjawaban, dan mempublikasikan laporan tersebut kepada masyarakat. Ini secara eksplisit menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan dana BOS.

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 juga mendorong penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan BOS untuk meningkatkan transparansi, mempercepat pelaporan, dan membuat pengawasan lebih mudah. Untuk melaporkan penerimaan dan penggunaan dana BOS, sekolah diharapkan dapat menggunakan aplikasi BOS Online, juga dikenal sebagai BOS Salur. Sistem digital ini membuat akses masyarakat ke informasi lebih mudah, yang menghasilkan peningkatan keterbukaan informasi.

Pemerintah daerah juga mengeluarkan pedoman teknis yang mendukung pengelolaan dana BOS di tingkat lokal. Biasanya, pedoman ini mencakup prosedur untuk menyusun RKAS, cara mendapatkan dana, dan bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban. Pentingnya pedoman daerah ini adalah bahwa mereka memberikan penyesuaian yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu, peraturan nasional dan lokal berfungsi sebagai dasar hukum yang mendukung pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas.

Akibatnya, berbagai hambatan di lapangan seringkali menghalangi pelaksanaan regulasi. Sebagian besar lembaga pendidikan menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan mereka sesuai dengan format yang ditentukan. Sebaliknya, karena jumlah pengawas yang terbatas, pengawasan dinas pendidikan seringkali tidak efektif. Oleh karena itu, untuk menjalankan regulasi dengan baik, diperlukan peningkatan kapasitas SDM sekolah serta peningkatan peran masyarakat dan sekolah itu sendiri.

**2.2.5 Faktor Pendukung dan Penghambat**

Berbagai faktor pendukung dan penghambat memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sekolah, terutama kepala sekolah dan bendahara, adalah faktor pendukung pertama. Sumber daya manusia yang berpengalaman dalam administrasi dan keuangan dapat memastikan pelaporan keuangan dilakukan dengan baik, tetapi kekurangan sumber daya manusia dapat menjadi penghalang utama untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas.

Penyediaan teknologi informasi merupakan komponen pendukung kedua. Media publikasi daring, sistem informasi keuangan sekolah, dan aplikasi BOS Online dapat mempermudah komunikasi publik. Teknologi memungkinkan penyampaian laporan yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Sebaliknya, keterbatasan akses internet atau kurangnya instruksi tentang penggunaan teknologi dapat menjadi hambatan besar, terutama bagi sekolah di daerah dengan infrastruktur yang kurang.

Partisipasi publik melalui komite sekolah juga merupakan faktor pendukung. Komite sekolah adalah perwakilan masyarakat yang dapat memberikan masukan terhadap RKAS, mengawasi pelaksanaan program, dan menerima laporan pertanggungjawaban. Partisipasi publik yang tinggi akan meningkatkan kontrol sosial, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, partisipasi masyarakat yang rendah akan mengurangi fungsi kontrol sosial.

Selain faktor-faktor tersebut, budaya yang ada di dalam sekolah juga berdampak. Sekolah dengan budaya yang lebih terbuka akan lebih mudah menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, sekolah dengan budaya birokratis yang ketat cenderung lebih tertutup dalam hal pengelolaan informasi. Akibatnya, mengubah budaya organisasi menjadi lebih terbuka adalah penting untuk meningkatkan tata kelola yang baik.

**2.3 Kerangka Berpikir**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alur logis hubungan antara gagasan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Transparansi berarti keterbukaan informasi, yang memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana dana BOS diterima, direncanakan untuk digunakan, dan dilaporkan tentang hasilnya. Sementara itu, akuntabilitas mengacu pada kewajiban sekolah untuk mengelola dana sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua konsep yang saling terkait dan menguatkan dalam manajemen sekolah.

Akuntabilitas dimulai dengan transparansi. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya memiliki kesempatan untuk mengawasi ketika informasi tentang dana BOS dibuka secara luas. Karena semua dana dapat dipantau, sekolah lebih cerdas dalam menggunakannya. Sebaliknya, akuntabilitas sulit diwujudkan tanpa transparansi karena masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup untuk menilai apakah pengelolaan dana sesuai dengan undang-undang. Akibatnya, transparansi dianggap sebagai cara untuk membangun akuntabilitas.

Akuntabilitas pada dasarnya bersifat substantif dan administratif. Sekolah harus melaporkan dana sesuai dengan peraturan dan format yang berlaku, menurut pertanggungjawaban administratif. Namun, pertanggungjawaban substantif lebih menekankan pada sejauh mana dana tersebut benar-benar digunakan untuk pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Akuntabilitas belum sepenuhnya terpenuhi jika sekolah hanya menangani masalah administratif dan mengabaikan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, penelitian ini memandang akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan substantif yang luas.

Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas tidak terpengaruh oleh elemen pendukung yang mendukung atau menghalangi keduanya. Faktor pertama adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya kepala sekolah dan bendahara BOS, yang bertanggung jawab langsung atas perencanaan dan pelaporan dana. Laporan yang sesuai dengan peraturan akan lebih mudah dibuat oleh SDM yang kompeten, sedangkan kekurangan sumber daya manusia sering menjadi penghalang untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Faktor kedua yang sangat penting adalah pemanfaatan teknologi informasi, yang memungkinkan penyampaian informasi keuangan yang cepat, akurat, dan tersedia bagi publik. Tanpa teknologi ini, transparansi sering terhambat oleh keterlambatan laporan dan keterbatasan dalam penyebaran informasi.

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas selain teknologi dan SDM. Komite sekolah, yang mewakili orang tua siswa, dapat bertindak sebagai pengawas eksternal untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan dengan benar. Jika ada partisipasi masyarakat yang tinggi, sekolah akan lebih terbuka, tetapi jika tidak ada, transparansi hanya akan menjadi formalitas. Budaya organisasi sekolah adalah komponen tambahan yang memengaruhi. Sekolah yang memiliki budaya yang terbuka akan lebih mudah untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sementara sekolah yang memiliki budaya birokratis cenderung lebih tertutup terhadap masyarakat umum.

Menurut uraian tersebut, transparansi adalah salah satu faktor yang memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Hubungan ini tidak berjalan sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan budaya sekolah. Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana hubungan tersebut terwujud dalam konteks SMP Negeri di Kota Bandar Lampung, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang yang muncul dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana tata kelola sekolah berjalan, tetapi juga membantu memperkuat penerapan Good Governance di bidang pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Atukunda, L. (2025). *Transparency and accountability in school governance*. ResearchGate. [https://www.researchgate.net/publication/393755164\_Transparency\_and\_Accountability\_in\_School\_Governance](https://www.researchgate.net/publication/393755164_Transparency_and_Accountability_in_School_Governance?utm_source=chatgpt.com)

Dinata, R. (2023). Analisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMAN 12 Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi 45*, 10(1), 45–56. [https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/852](https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/852?utm_source=chatgpt.com" \t "_new)

Fatima, A., Haliah, & Nirwana. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 233–248. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2509802

Hakim, R., & Enjelita, M. (2025). Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 14(1), 77–90. https://journal.uny.ac.id/index.php/jap/article/view/55555

Harahap, F., Nurwani, & Nasution, N. (2024). Transparansi dan akuntabilitas sebagai faktor penentu kemajuan sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(2), 101–115. https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/56789

Istiqomah, N., & Abidin, M. (2024). Implementasi transparansi dana BOS di sekolah menengah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(1), 55–70. https://ejournal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/6721

Jurnal P4I. (2022). Analisis pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(3), 211–225. [https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia/article/view/1789](https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia/article/view/1789?utm_source=chatgpt.com" \t "_new)

Nielsen, J., dkk. (2021). Integrating public participation, transparency, and accountability in governance. *Frontiers in Political Science*, 3, 747838. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpos.2021.747838/full

Permata, S., & Mustoffa, R. (2023). Akuntabilitas sekolah melalui partisipasi orang tua dalam pengelolaan dana BOS. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 99–110. https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jpe/article/view/33241

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS. (2022). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/339810/PERMENDIKBUDRISTEK%20NOMOR%2063%20TAHUN%202022.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/339810/PERMENDIKBUDRISTEK%20NOMOR%2063%20TAHUN%202022.pdf?utm_source=chatgpt.com" \t "_new)

Rusyunizal, D., Abdul Karim, H., & kolega. (2025). Building school financial transparency based on good governance principles. *Proceedings of the International Conference on Management, Innovation and Education (ICMIE)*. [https://www.icmieproceedings.org/index.php/icmie/article/download/67/46](https://www.icmieproceedings.org/index.php/icmie/article/download/67/46?utm_source=chatgpt.com)

Ryanti, R. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS (Studi kasus SD Negeri 01 Sawahan Kota Padang). *Repository Universitas Dharma Andalas*. [https://repository.unidha.ac.id/id/eprint/276/1/ABSTRAK.pdf](https://repository.unidha.ac.id/id/eprint/276/1/ABSTRAK.pdf?utm_source=chatgpt.com" \t "_new)

Sudyartini, N., & Wafa, A. (2022). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Pendidikan*, 4(1), 34–49. https://journal.upy.ac.id/index.php/jakp/article/view/4082

UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. United Nations Development Programme. https://digitallibrary.un.org/record/492551

UNESCAP. (2009). *What is good governance?*. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. [https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf](https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf?utm_source=chatgpt.com)

Zahra, S. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 4 Pelaihari. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 120–132. https://ejournal.ulm.ac.id/index.php/jap/article/view/4173